



DINAMIKA KONFLIK SURIAH PADA MASA PEMERINTAHAN BASHAR AL-ASSAD

Yuliansyah

Politeknik Negeri Sambas
yoelashshidiqie@gmail.com

Syamzan Syukur

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
syamzan.syukur@uin-alauddin.ac.id

Susmihara

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
mihara.ogi@gmail.com

ABSTRACT

This paper departs from the conflict that occurred in Syrian City, so it makes the author interested in trying to understand the basic problems that are the cause of the conflict. In addition, the author also tries to see who the actors who played a role in the conflict are, as well as the impact that the Syrian conflict has on the international world. The Syrian conflict has been going on for forty years to date, and the conflict has not yet seen its end. Since March 2011 the conflict in Syria has claimed so many lives, thousands of people have been displaced, and thousands of children orphaned. Many houses collapsed, infrastructure and public facilities were destroyed due to the conflict. Data on the Syrian conflict is collected from books, journals, and the web. These data are then categorized, systematized, and analyzed according to the purpose of writing. This paper concludes that the cause of the conflict in Syria is not due to differences in religious sects but rather the political and economic interests of the opposition opponents of Assad and opposition-supporting countries. There are three actors who play a role in the Syrian conflict: President Bashar al-Assad and his supporters, the Syrian opposition, and the Jihadist group. The resulting impact of the Syrian conflict is the large number of casualties that have fallen and the problem of refugees. From the time of the conflict in March 2011 to April 2013, The death toll was 150,000. Meanwhile, the displaced population is 2.4 million people, which is dominated by women and children. Meanwhile, 4 million Syrians are homeless. For the international community, the Syrian conflict has an impact on the handling of refugees.

Keywords: *Conflict; Civil War; Syi'ah, Sunni; al-Qaida, Refugees.*

ABSTRAK

Tulisan ini berangkat dari konflik yang terjadi di Kota Suriah, sehingga membuat penulis tertarik untuk mencoba memahami permasalahan dasar yang menjadi penyebab konflik. Selain itu penulis juga mencoba untuk melihat siapa aktor yang berperan dalam konflik tersebut, serta dampak yang diakibatkan dari konflik Suriah bagi dunia Internasional. Konflik Suriah telah berlangsung selama empat puluh tahun hingga saat ini, dan konflik tersebut belum kelihatan akhirnya. Sejak Bulan Maret tahun 2011 konflik di Suriah ini telah menelan begitu banyak korban, beribu masyarakat mengungsi, dan ribuan anak-anak yang menjadi yatim piatu. Banyak rumah yang roboh, infrastruktur dan sarana publik hancur dikarenakan konflik tersebut. Data-data tentang konflik suriah dikumpulkan dari buku, jurnal, dan web. Data-data tersebut kemudian dikategorisasikan, disistematisasikan, serta dianalisis sesuai dengan tujuan penulisan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa penyebab konflik di Suriah bukanlah karena perbedaan mazhab keagamaan melainkan kepentingan politik dan ekonomi dari oposisi penentang Assad dan negara-negara pendukung oposisi. Ada tiga aktor yang berperan dalam konflik Suriah yakni: Presiden Bashar al-Assad dan para pendukungnya, oposisi Suriah, dan kelompok Jihadis. Dampak yang diakibatkan dari konflik Suriah ini adalah banyaknya korban jiwa yang berjatuh serta permasalahan pengungsi. Sejak kejadian konflik pada bulan Maret 2011 sampai dengan April 2013, jumlah korban yang meninggal dunia sebanyak 150.000 jiwa. Sedangkan warga yang mengungsi sebanyak 2,4 juta orang, yang didominasi oleh kaum perempuan dan anak-anak. Sementara itu, 4 juta warga Suriah kehilangan tempat tinggal. Bagi dunia Internasional, konflik Suriah berdampak pada penanganan pengungsi.

Kata Kunci: Konflik; Perang Sipil; Syi'ah; Sunni; al-Qaida; Pengungsi

PENDAHULUAN

Konflik Suriah diawali dari suatu kejadian penangkapan beberapa pelajar yang berada di Kota Kecil Darra, kejadian tersebut muncul dikarenakan adanya protes terhadap penangkapan beberapa pelajar di kota kecil Daraa tersebut (Starr, 2012). Pada bulan Maret tahun 2011, 15 pelajar berumur antara 9-15 tahun menulis slogan-slogan anti pemerintah di tembok-tembok kota (Sulaeman, 2013). Slogan-slogan itu berbunyi, "Rakyat menginginkan rezim turun" (Muti'ah, 2012). Anak-anak ini kemungkinan terinspirasi oleh pergolakan yang terjadi di Tunisia sehingga menyebabkan Presiden Zainal Abidin bin Ali dapat turun pada tanggal 14 Januari tahun 2011. Hal ini menyebabkan terjadinya pergolakan Mesir yang mengakibatkan jatuhnya Presiden Hosni Mubarak pada tanggal 1 Februari 2011. Melihat aksi 15 pelajar itu, polisi Suriah yang dipimpin oleh Jendral Atef Najib, sepupu Presiden Bashir al Assad menangkap dan memenjarakan anak-anak ini. Hal tersebut mengakibatkan, lahirnya gelombang protes yang menuntut pembebasan anak-anak tersebut. Reaksi yang dilakukan oleh para tentara terhadap protes itu berlebihan, tentara menembaki para pemprotes dan mengakibatkan 4 orang meninggal dunia. Reaksi yang dilakukan oleh para tentara itu tidak meredakan protes yang terjadi, sebaliknya protes semakin meluas dari Daraa menuju kota-kota pinggiran Latakia dan Banyas di Pantai Mediterania atau Laut Tengah, Homs, Ar Rasta, dan Hama di Suriah Barat, serta Deir es Zor di Suriah Timur (Muti'ah, 2012).

Protes dan demonstrasi ini kemudian berkembang menjadi perang sipil yang dahsyat. Perang ini tidak saja menggunakan senjata konvensional sebagaimana layaknya yang digunakan dalam perang, tetapi juga menggunakan senjata kimia (BBC Indonesia, 2013).

Ada pandangan yang menyatakan bahwa perang yang terjadi di Suriah adalah perang antara mazhab Syi'ah yang diwakili oleh Bashar al-Assad dan para penentangannya yang bermazhab Sunni. Pandangan ini dibangun atas fakta yang terjadi di Suriah: ada dua kekuatan besar yang sedang bertarung, yakni Arab Saudi yang bermazhab Sunni dan Iran bermazhab Syi'ah. Fakta lainnya adalah bahwa pemerintahan Assad didukung oleh Iran dan gerakan Hizbullah, Iran merupakan negara yang bermazhab Syi'ah dan Hizbullah adalah gerakan berhaluan Syi'ah yang bermarkas di Lebanon. Sebaliknya para penentang Assad mendapat dukungan negara-negara yang bermazhab Sunni seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Afghanistan.

METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan kajian kepustakaan, data-datanya berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang terdapat dalam buku-buku, artikel, jurnal, dan hasil penelitian baik dalam cetak maupun dalam bentuk digital. Data-data yang berasal dari sumber kepustakaan kemudian dipilah dalam klaster-klaster yang sesuai dengan tujuan kajian penulisan. Setelah itu data tersebut dianalisis dengan cara reduksi, display data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi Konflik

Sumber konflik Suriah supaya bisa dipastikan, maka terlebih dahulu perlu diketahui seperti apa kronologi konfliknya, karena pada runtutan peristiwa konflik tersimpan sumber yang menjadi penyebab lahirnya konflik di Suriah. Konflik Suriah dapat dirunut dari peristiwa protes yang dilakukan oleh sekelompok pelajar saat menulis slogan-slogan anti pemerintah di tembok-tembok kota (Sulaiman, 2013). Slogan-slogan itu berbunyi, "rakyat menginginkan rezim turun" (Muti'ah, 2012). Kepolisian pemerintah Suriah menangkap para pelajar itu kemudian memenjarakan mereka selama satu bulan. Selama dalam masa penahanan, para pelajar itu mengalami penyiksaan, hal itu diketahui setelah para pelajar itu dibebaskan.

Mengetahui penyiksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tanggal 11 Maret 2011 masyarakat kemudian melakukan aksi demonstrasi yang digelar di Kota Barat Daya Daraa yang memprotes penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Pasukan keamanan berupaya membubarkan demonstrasi, namun para demonstran tidak bergeming, sampai akhirnya pasukan keamanan melepaskan tembakan ke arah para demonstran (Britannica.com, 2014).

Pada tanggal 23 Maret tahun 2011, demonstrasi kembali melanda kota Daraa, pasukan keamanan kembali melepaskan tembakan untuk membubarkan para demonstran, pada kasus ini 20 orang demonstran dikabarkan tewas. Menyusul insiden tersebut, Presiden Bashar al-Assad, mengumumkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menerapkan reformasi politik, termasuk menghapus pembatasan partai politik dan

menghapus hukum darurat Suriah yang telah diterapkan selama 48 tahun. Namun pengumuman itu diabaikan oleh para tokoh oposisi Suriah.

Pada 25 Maret 2011, setelah salat Jum'at, unjuk rasa kembali terjadi di kota-kota seluruh negeri Suriah. Pasukan keamanan kembali berupaya membubarkan aksi unjuk rasa itu, namun unjuk rasa terus berjalan bahkan bertambah intens. Protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh oposisi Suriah mendapat perlawanan dari rakyat Suriah yang pro-pemerintah, perlawanan itu ditunjukkan dengan dilakukannya demonstrasi besar-besaran di Kota Damaskus.

Pada 29 Maret 2011 pemerintah Suriah mengumumkan pengunduran diri dari kabinet, hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan reformasi yang didengungkan oleh para demonstran. Satu hari setelah pengumuman itu, Presiden Assad tampil untuk pertama kalinya di depan publik sejak kerusuhan melanda Suriah, dan menyampaikan pidato di hadapan dewan legislatif untuk meredam protes para demonstran dan mengklaim bahwa protes itu terjadi karena konspirasi yang dilakukan pihak asing. Tetapi Assad juga mengakui, bahwa beberapa kekhawatiran para demonstran memang patut diperhatikan. Assad menolak ajakan oposisi untuk melakukan percepatan reformasi dan mengatakan bahwa pemerintah akan melanjutkan rencananya untuk memperkenalkan reformasi secara bertahap. Setelah pidato tersebut, media pemerintah Suriah mengumumkan bahwa Assad telah membentuk sebuah komisi untuk mempelajari kemungkinan pencabutan hukum darurat.

Demonstrasi telah terjadi secara sporadis di seluruh negeri, pemerintah Suriah terus menghubungkan kerusuhan kepada konspirasi asing dan ketegangan sektarian. Pemerintah membuat beberapa konsesi yang ditujukan kepada Muslim Suriah konservatif dan minoritas Kurdi. Pada 6 April 2011, pemerintah Suriah berusaha untuk menjawab keresahan Muslim konservatif dengan menutup satu-satunya kasino Suriah dan membatalkan hukum 2010 yang melarang guru perempuan mengenakan niqab (cadar) yang menutupi wajah. Pemerintah juga mengumumkan bahwa Noruz, yakni festival tahun baru yang di rayakan oleh orang Kurdi sebagai hari libur nasional.

Protes tidak berhenti, bahkan terus berlanjut dan menyebar ke kota lainnya, yang mengakibatkan terjadinya peningkatan penggunaan kekerasan oleh pasukan keamanan Suriah. Pada 8 April 2011, pasukan keamanan menembaki demonstran di beberapa kota Suriah, menewaskan sedikitnya 35 orang. Menyusul sebuah laporan bahwa jumlah korban tewas telah mencapai lebih dari 200 orang. Muncullah kecaman internasional terhadap pemerintah Suriah. Sejumlah organisasi pembela HAM dan para kepala negara menyerukan pemberhentian kekerasan. Pasukan keamanan terus menggunakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa di seluruh negeri, Assad menunjuk kabinet baru dan berjanji untuk melembagakan reformasi politik dan mencabut hukum darurat Suriah.

Pada tanggal 19 April 2011 kabinet mencabut undang-undang darurat dan membubarkan Mahkamah Agung Keamanan Negara Suriah. Pengadilan yang khusus digunakan untuk mengadili pihak-pihak anti pemerintah. Namun, pemerintah Suriah akhirnya mengambil tindakan untuk mempertahankan kekuasaannya dengan berupaya untuk meredam protes. Pemerintah Suriah mengeluarkan peraturan yang mengharuskan masyarakat untuk mendapatkan izin dari pemerintah sebelum melakukan demonstrasi. Menteri dalam negeri Suriah yang baru diangkat mendesak rakyat Suriah agar tidak

melakukan demonstrasi dengan menyatakan bahwa pemerintah akan terus menganggap demonstrasi sebagai ancaman nasional.

Hukum darurat setelah dibubarkan, maka pemerintah Suriah kemudian meningkatkan penggunaan kekerasan terhadap demonstran. Pada tanggal 22 April 2011 pasukan keamanan menembaki demonstran yang berkumpul setelah salat Jumat, menewaskan sekitar 75 orang, di tengah kecaman internasional yang dipicu oleh maraknya aksi pembunuhan, pemerintah Suriah melancarkan strategi baru untuk membungkam protes masyarakat dengan menyebarkan sejumlah besar pasukan yang dilengkapi dengan tank dan kendaraan lapis baja ke kota-kota Daraa, Baniyas, Homs, dan tiga lokasi yang dijadikan sebagai pusat anti pemerintah. Di beberapa daerah di negeri tersebut, pemerintah memberlakukan pemadaman akses komunikasi, mematikan layanan telepon dan internet. Di Daraa, pasukan keamanan memotong pasokan air dan listrik.

Seiring dengan demonstrasi yang terus menyebar di Suriah, pemerintah meningkatkan perlawanan terhadap para pengunjuk rasa dengan kekuatan militer. Pada awal Mei, protes anti pemerintah telah mencapai Damaskus. Protes yang terjadi di pusat Kota Damaskus ditangani dengan aksi kekerasan pasukan pemerintah Suriah, dengan mendirikan barikade keamanan di beberapa pinggiran kota Damaskus. Hal ini dilakukan untuk membatasi gerakan para demonstran. Dengan kejadian tersebut maka, Uni Eropa (UE) menjatuhkan sanksi berupa pelarangan perjalanan dan pembekuan aset kepada sejumlah pejabat senior Suriah yang dianggap bertanggungjawab dalam penanganan demonstrasi. Selain itu, UE juga menerapkan embargo senjata untuk Suriah. Seiring dengan kekerasan yang terus terjadi, Suriah juga semakin terisolasi dari sekutu regionalnya. Pada bulan Mei, Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Turki, mengutuk penggunaan kekerasan terhadap warga sipil. Beberapa minggu kemudian, Turki memberikan dukungan untuk pihak demonstran dengan mengadakan sebuah konferensi bagi para anggota oposisi Suriah.

Pada tanggal 6 Juni kantor berita Suriah melaporkan bahwa 120 tentara Suriah disergap dan dibunuh oleh sekelompok orang bersenjata di kota utara Jisr al-Shugur. Masyarakat setempat menyangsikan kebenaran berita tersebut dengan menyatakan bahwa tentara Suriah dibunuh oleh pasukan pemerintah karena menolak untuk menembaki demonstran. Menanggapi insiden tersebut pihak militer Suriah meluncurkan serangan yang berat menyebabkan ribuan warga melarikan diri dan melintasi perbatasan Turki. Rezim Assad terus menggunakan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa di bulan Juli dan Agustus, serta meluncurkan serangan militer terhadap sejumlah Kota termasuk Hammah dan Latakia. Pertumpahan darah terus menuai kecaman internasional yang menyerukan Assad untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden.

Pada awal November 2011, pejabat Suriah menyetujui inisiatif Liga Arab yang menyerukan pemerintah Suriah untuk menghentikan kekerasan terhadap para demonstran, dan menarik mundur tank serta kendaraan lapis baja dari kota-kota, dan membebaskan para tahanan politik. Beberapa pihak menilai persetujuan pemerintah Suriah sebagai taktik untuk mengulur waktu. Satu hari kemudian kekerasan kembali terjadi di kota Homs. Di bawah tekanan internasional, pemerintah Suriah pada bulan Desember mengizinkan kunjungan delegasi Liga Arab untuk memantau proses implementasi dari strategi tersebut. Meskipun kekerasan terus terjadi, penilaian yang

diberikan oleh tim pemantau cenderung positif sehingga menuai kritik dari kelompok HAM dan oposisi Suriah. Pada pertengahan Januari 2012, kredibilitas delegasi yang telah mengundurkan diri mengklaim bahwa pasukan pemerintah Suriah telah memberikan laporan palsu dari rekaman video yang direkayasa. Setelah beberapa negara Arab menarik anggota tim mereka dari posisi sebagai observer Liga Arab secara resmi menanggukuhkan keberlanjutan misi pemantau pada 28 Januari dengan alasan kekerasan.

Setelah kegagalan misi pemantau dari Liga Arab, kekerasan di Suriah terus meningkat. Pada awal Februari 2012, tentara Suriah meluncurkan serangan ke kota Homs dengan membombardir wilayah yang dikuasai oposisi selama beberapa minggu. Pada bulan yang sama, Liga Arab dan PBB bersama-sama menunjuk Koffi Annan, mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai utusan perdamaian untuk Suriah. Upaya Annan untuk penghentian kekerasan sebagaimana dihadapi Liga Arab pada tahun 2011, digagalkan oleh keengganan rezim Suriah untuk mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Gencatan senjata yang disuarakan oleh PBB berhasil mengurangi angka kekerasan pada pertengahan April. Namun gencatan senjata hanya bertahan selama beberapa hari sebelum konflik antara pasukan pemerintah dan oposisi kembali terjadi. PBB menghentikan operasi pemantauan pada bulan Juni atas alasan keamanan. Akibat peningkatan jumlah kekerasan yang terjadi selama musim panas 2012, Annan mengundurkan diri pada bulan Agustus dan digantikan oleh diplomat Aljazir, Lakhdar Brahimi.

Pada awal 2012, pengamat internasional dan anggota oposisi menganggap bahwa Dewan Nasional Suriah yang berbasis di Istanbul masih terlalu lemah untuk mewakili kelompok oposisi Suriah. Pada bulan November, pemimpin oposisi Suriah mengumumkan pembentukan koalisi baru yang disebut Koalisi Nasional untuk Revolusi Suriah dan Kekuatan Militer Oposisi Koalisi Nasional Suriah. Dalam satu bulan koalisi mendapat pangakuan dari berbagai negara sebagai wakil sah rakyat Suriah. Dalam satu bulan berikutnya, sejumlah negara mengakui Koalisi Nasional Suriah sebagai pihak yang secara efektif dapat mewakili kelompok oposisi.

Pada akhir tahun 2012, situasi militer tampaknya sudah mendekati jalan buntu. Pejuang pemberontak menguasai wilayah utara Suriah, namun menghadapi kesulitan dalam penyediaan peralatan, persenjataan, dan aspek organisasi. Sementara itu, pasukan pemerintah juga semakin lemah akibat sejumlah aparat yang berbalik memihak oposisi. Pertempuran masih berlanjut setiap hari di wilayah yang diperebutkan, menyebabkan semakin tingginya korban tewas dari masyarakat sipil.

Begitu minimnya perkembangan yang terjadi di Suriah, negara-negara sekutu yang memihak pemerintah Suriah dan pemberontak sama-sama meningkatkan dukungan mereka yang menyebabkan meningkatnya kemungkinan perang sipil. Upaya Turki, Arab Saudi, dan Qatar untuk mendanai dan mempersenjatai pihak pemberontak semakin terlihat pada akhir 2012 dan awal 2013, sementara pemerintah Suriah terus menerima senjata dari Iran dan kelompok militan Libanon, Hizbullah. Akhir tahun 2012, Hizbullah juga mulai mengirim para pejuangannya sendiri ke wilayah Suriah untuk melawan para pemberontak.

Babak baru yang memungkinkan penggunaan aksi militer internasional di wilayah Suriah, semakin menguat setelah adanya dugaan penggunaan senjata kimia di pinggir

kota Damaskus oleh rezim Assad yang menewaskan ratusan orang pada 21 Agustus 2013. Kelompok oposisi Suriah mengklaim bahwa pasukan pro-Assad telah melakukan serangan tersebut. Pejabat Suriah menyangkal penggunaan senjata kimia dan menegaskan bahwa apabila senjata kimia dipergunakan dalam serangan, maka kesalahan berada pada pasukan pemberontak. Utusan PBB menemukan bukti senjata kimia di beberapa lokasi di Suriah. Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis mengecam penggunaan senjata kimia oleh rezim Assad dan berencana untuk melakukan aksi militer. Assad juga menyatakan untuk melawan apa yang ia sebut sebagai agresi Barat.

Kemungkinan terjadinya intervensi militer di Suriah mulai memudar pada akhir Agustus. Sebagian besar masyarakat Amerika dan Inggris menentang rencana aksi militer. Upaya Inggris untuk melakukan serangan militer Suriah digagalkan oleh Parlemen pada tanggal 29 Agustus. Voting yang diadakan di Kongres Amerika juga diundur, pada tanggal 10 September. Sementara itu, jalur diplomasi semakin gencar dilakukan oleh berbagai pihak yang menghasilkan kesepakatan antara Rusia, Suriah dan Amerika Serikat pada tanggal 14 September untuk menempatkan semua senjata kimia yang dimiliki Suriah di bawah kontrol internasional (Britannica.com, 2014).

B. Sumber Konflik

Ada beragam pandangan yang bisa dikemukakan terkait masalah yang menjadi sumber utama konflik Suriah. Pertama, masalah sosial, ekonomi dan politik di dalam negeri yang dihadapi oleh Suriah. Masalah-masalah itu antara lain berupa tingginya jumlah pengangguran, tingginya inflasi, terbatasnya kesempatan untuk mobilitas sosial, pembatasan kebebasan politik, dan aparat keamanan yang represif. Kedua, tuntutan sebagian penduduk Suriah agar dilakukan reformasi dan penggantian rezim Bashar al-Assad. Sejak tahun 1963, pemerintahan Suriah didominasi oleh Partai Baath, kemudian keluarga al-Assad, yakni Hafidz al-Assad yang memerintah sejak tahun 1970 hingga kematiannya di tahun 2000, dan digantikan oleh putranya, yakni Bashar al-Assad dan memerintah sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang. Selama empat puluh tahun di bawah pemerintahan klan Assad (Hafez al-Assad dan anaknya Bashar al-Assad) pembangunan sosial dan ekonomi Suriah masih jauh dari memuaskan. Suriah tergolong dalam negara berkembang berpendapatan menengah. Perekonomiannya ditopang terutama oleh minyak dan pertanian, sejak 2004 Suriah dikenai sanksi ekonomi oleh AS yang melarang atau membatasi ekspor-impor ke Suriah (Sulaiman, 2013).

Pada situasi seperti ini, sangat wajar apabila muncul demo anti pemerintah dan keinginan perubahan rezim. Klan Assad memang telah berkuasa terlalu lama sehingga wajar ada kejenuhan politik. Pada Maret 2011, seiring dengan gelombang pemberontakan di negara-negara Arab, seperti Mesir dan Tunisia, aksi-aksi demo terjadi di Suriah. Para pengunjuk rasa menuntut reformasi, mundurnya Presiden Bashar al-Assad, dibukanya kebebasan mendirikan partai politik, kebebasan berbicara, dan perbaikan ekonomi. Aksi demo tersebut ditanggapi oleh pemerintah Suriah telah memberikan beberapa konsep dan memenuhi sebagian tuntutan rakyat.

Sesuai dengan pernyataan yang telah disebutkan di atas, maka pada tanggal 21 April, pemerintah secara resmi mengumumkan pencabutan undang-undang darurat yang telah diberlakukan sejak 1963 dengan alasan negara sedang dalam kondisi darurat,

karena berhadapan dengan ancaman Israel dan kelompok-kelompok militan. Undang-undang darurat itu dianggap melanggar HAM, karena memberikan keleluasaan kepada Pemerintah untuk melarang pertemuan politik dan menangkap orang-orang yang dicurigai membahayakan kestabilan negara. Namun, semua upaya negosiasi yang dilakukan kepada Assad adalah mundurnya Assad seperti yang terjadi di Mesir, Tunisia, dan Libya. Namun, pandangan bahwa faktor penyebab konflik Suriah adalah tuntutan penggantian rezim Bashar al-Asaad sebagai dampak dari Arab spring ditolak oleh aktivis kemanusiaan MER-C Joserizal Jurnalis. Menurutnya, jika tuntutan penggantian rezim merupakan faktor penyebab konflik dan peperangan di Suriah mengapa hal yang sama tidak terjadi di Qatar dan Arab Saudi, kedua negara itu menurutnya tidak lebih demokratis dibandingkan dengan Suriah (voa-islam.com, 2013). Tetapi mengapa Arab spring yang menuntut demokratisasi justru terjadi di Suriah setelah sebelumnya terjadi di Tunisia, Mesir, dan Libya.

Menurut pandangan Joserizal, tuntutan demokrasi di Suriah adalah pemicu konflik dan peperangan, bukan faktor utama penyebab konflik dan peperangan itu sendiri. Pandangan Jose ada benarnya terutama jika dikaitkan pada aktor-aktor yang terlibat di dalam konflik. Pada awalnya yang berhadapan dalam konflik Suriah adalah antara regim Bashar al- Assad dengan pihak oposisi, namun dalam perkembangannya, konflik itu justru meluas eskalasinya, akibat masuknya berbagai pejuang jihad seperti al-Qaida ke Suriah.

Menurut pandangan Jose ada dua faktor penyebab peperangan di Suriah tidak kunjung selesai sampai sekarang. Kedua faktor itu adalah pertama, Suriah adalah negara yang kuat secara militer dan inteljen. Kedua Suriah selalu menunjukkan sikap perlawanan dengan Israel. Kondisi Suriah yang demikian membuat negara-negara seperti Israel, Amerika Serikat, NATO, Qatar, Arab Saudi dan Turki memberikan dukungannya kepada oposisi yang sedang berjuang menumbangkan Assad. Konflik dan peperangan di Suriah dengan demikian lebih disebabkan oleh faktor kepentingan negara-negara di sekeliling Suriah, yakni Qatar, Arab Saudi, dan Israel. Ketiga, faktor lain yang sering dijadikan penyebab konflik di Suriah diabaikan oleh pihak oposisi, karena tuntutan lebih didominasi oleh minoritas Syi'ah Alawiyah atas politik Suriah.

Dominasi yang terjadi di Suriah melahirkan diskriminasi terhadap mazhab Sunni dan pembatasan gerakan kelompok Ikhawanul Muslimin, serta melahirkan penguasaan elit Syi'ah Alawiyah atas berbagai sektor perekonomian di Suriah (Ghafur, 2012). Faktor ini sering dijadikan penyebab konflik dan peperangan di Suriah sebagai konflik dan peperangan antarpaham keagamaan dalam Islam. Suriah dipimpin oleh Bashar al-Asaad yang bermazhab Syi'ah Alawiyah, sementara pihak penentang Asaad berasal dari mazhab Islam Sunni. Rezim Assad didukung oleh Iran dan Hizbullah yang bermazhab Syi'ah, sebaliknya penentang Assad didukung oleh Qatar, Saudi Arabia, Turki, al-Qaeda, Jabhat al-Nusro yang bermazhab Sunni.

Faktor perbedaan mazhab keagamaan sebagai penyebab konflik Suriah juga di tolak oleh Sulaeman, menurutnya faktor mazhab dalam konflik Suriah adalah pemicu konflik bukan penyebab utama. Alasannya karena konflik di Suriah melibatkan banyak aktor, bukan hanya oposisi penentang Assad yang bermazhab Sunni, tetapi juga melibatkan pemimpin-pemimpin negara seperti Amerika, Perancis, dan Inggris. Keterlibatan berbagai pihak itu dalam konflik di Suriah membuat konflik yang terjadi

sejak 11 Maret 2011 itu tidak kunjung terlihat mereda. Korban yang tercatat dari sejak konflik hingga April 2013 sudah mencapai 92.900-100.000 jiwa.

Menurut Hinnebusch dan Sulaeman bahwa rezim Assad bukan rezim yang dibangun atas ideologi agama dan ajaran Syi'ah Alawiyah sebagai basisnya. Rezim Assad adalah rezim "otoriterian yang populis". Pemerintahan Assad menghadapi ancaman dari luar (Israel) dan ketidakstabilan internal sehingga memilih bersikap otoriter demi terciptanya kestabilan negara. Namun, pada saat yang sama Assad berusaha membangun negara dengan mengupayakan dukungan dari masyarakat kelas menengah dan bawah. Assad sangat peduli dengan pentingnya dukungan yang muncul dari hati rakyat, bukan kepatuhan yang muncul dari rasa takut kepada rezim. Kebijakan pemerintahannya sangat populis dengan memberikan layanan kesehatan gratis dan sekolah gratis hingga universitas. Rezim Assad tidak hanya berisi orang-orang Alawiyah, bahkan Assad sebenarnya menolak untuk menjadi pemimpin kaum Alawiyah dengan cara mengangkat orang-orang di luar Alawiyah menjadi tokoh-tokoh penting di pemerintahan dan militer. Tokoh-tokoh di luar Alawiyah terlihat pada komposisi pimpinan militer misalnya 43% Sunni dan 37% Alawiyah, sedangkan komposisi menteri 58% Sunni dan 20% Alawiyah, sisanya diisi oleh Druze, Ismaili, dan Kristen (Sulaiman, 2013).

Apabila disederhanakan sumber konflik Suriah dapat dipilah menjadi dua, pertama, berasal dari dalam negeri, yakni masalah sosial, ekonomi, dan politik dalam berupa tingginya pengangguran, tingginya inflasi, terbatasnya mobilitas sosial, merajalelanya korupsi, tidak adanya kebebasan politik, represifnya aparat keamanan (Jeremy, 2013). Kedua, berasal dari luar negeri, berupa kepentingan politik dan ekonomi. Turki misalnya berambisi untuk menjadi pemain utama di Timur Tengah karena itu negara ini ikut campur dalam konflik Suriah. Qatar dan Arab Saudi takut akan Iran yang membantu Suriah, Israel juga berkepentingan terhadap jatuhnya pemerintahan Assad karena selama ini Suriah bersekutu dengan Iran, Hamas, dan Hisbullah dalam menentang Israel. Suriah bahkan negara yang sangat keras menentang Israel. Sementara negara-negara Barat berkepentingan terhadap gas bumi di Suriah (Sulaiman, 2013).

C. Aktor yang Terlibat dalam Konflik

Aktor yang memainkan peran penting dalam konflik Suriah bisa dikelompokkan dalam tiga kelompok; pertama, Presiden Bashar al-Assad dan para pendukungnya, kedua, oposisi Suriah, dan ketiga, kelompok Jihadis. Ketiga kelompok ini masing-masing memiliki tujuan yang berbeda-beda. Presiden Assad berupaya mempertahankan negara dan pemerintahannya, sementara pihak oposisi berupaya merebut kekuasaan Assad, sedangkan kelompok jihadis, berupaya merebut kekuasaan dan negara Suriah dengan mendeklarasikan khilafah, yakni Islamic State Iraq and Sham (ISIS). Berikut ini akan dijelaskan ketiga kelompok tersebut:

1. Presiden Basharal-Assad dan Pendukungnya

Presiden Bashar al-Assad mulai menduduki jabatan Presiden Suriah tahun 2000, ia menggantikan posisi ayahnya. Di awal masa kekuasaannya, ia memosisikan dirinya sebagai seorang reformis. Namun kritik tajam meluncur ketika masyarakat tidak merasakan perubahan yang signifikan. Protes keras terhadap rezim Assad muncul pada maret 2011 yang menyebabkan terjadinya perang sipil hingga saat ini.

Rezim Assad didukung oleh minoritas Alawi, Druze, dan Ismaili, banyak kaum Kristen yang mendukung Assad karena kebijakan sekulernya.

Negara Iran, Rusia dan China adalah negara yang mendukung rezim Assad, selain didukung oleh negara tersebut, rezim Assad juga memperoleh dukungan dari kelompok Hizbullah Lebanon. Pemimpin Hizbullah Libanon menyatakan bahwa kelompok militan Syi'ah yang dipimpinnya tidak akan tinggal diam ketika kelompok aliansinya di Damaskus mengalami penyerangan. Syaikh Hassan Nasrallah bahkan menyatakan bahwa anggota Hizbullah berperang di Suriah melawan kelompok ekstremis Islam yang membahayakan Libanon, dan bersumpah bahwa kelompoknya tidak akan mengizinkan militan Suriah untuk mengambil alih wilayah yang berbatasan dengan Libanon. Suriah bersama dengan Iran, telah menjadi pendukung utama Hizbullah. Diyakini bahwa ribuan roket yang dimiliki oleh kelompok tersebut berasal dari Suriah.

2. Oposisi Suriah

Ada dua kelompok oposisi yang menentang dan melakukan pemberontakan kepada rezim Assad, yakni: Pertama, kelompok pemberontak Suriah antara lain Free Syrian Army (FSA), Syrian National Council (SNC) dan Syrian National Council for Opposition and Revolutionary Forces (SNCORF) yang dibentuk atas inisiatif Amerika di Doha, Qatar koalisi ini terdiri dari 60 anggota yang berasal dari 22 mantan anggota SNC, perwakilan dari masing-masing kota besar Suriah, dan sejumlah tokoh pemberontak Suriah yang berada di luar negeri. Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya telah mengakui koalisi tersebut sebagai wakil masyarakat Suriah. (Kanada belum memberikan keputusan). Presiden SNCORF terpilih adalah Moaz al-Khatib dari kalangan Ikhwanul Muslimin, sementara Perdana Menterinya Ghassan Hitto pengusaha asal Suriah keturunan Kurdi, yang telah selama 30 tahun terakhir menjadi AS. Namun SNCORF kemudian pecah dan al-Khatib dan beberapa anggota SNCORF mengundurkan diri. Pada Juli 2013, pemberontak veteran Ahmad Jarba dinobatkan sebagai presiden Koalisi pada Juli 2013. Jarba merupakan anggota etnis mayoritas yang berasal dari Suriah bagian Timur. Jarba diyakini memiliki hubungan dekat dengan Arab Saudi (Sulaiman, 2013). Kedua, Kelompok Oposisi anti-kekerasan, antisektarianisme, dan anti-intervensi asing; mereka tergabung dalam koalisi yang bernama National Coordination Body for Democratic Change.

3. Kelompok Jihadis

Kelompok jihadis merupakan kelompok yang berafiliasi dengan al-Qaida. Pada awalnya kelompok ini membantu oposisi Suriah dalam melakukan pemberontakan terhadap rezim Assad, namun dalam perkembangannya mereka tidak lagi membantu para oposisi tetapi memiliki agenda tersendiri untuk membentuk khilafah. Diantara kelompok jihadis tersebut adalah Jabha al-Nusra, Ahrar al-Sham kataeb, Liwa' al-Tauhid, Ahrar Souria, Halab al-Shahba, al-Harakah al-Fajr al-Islamiyah, Dar al-Ummah, Liwa Jaish Muhammad, Liwa' al-Nasr, Liwa' Dar al-Islam dan lain-lain.

Kelompok Jihadis menyatakan bertanggungjawab dalam sejumlah aksi bom bunuh diri yang ditargetkan terhadap pemerintah Suriah selama terjadinya perang sipil di negara tersebut. Pada Desember 2012, Amerika Serikat menyatakan kelompok jihad Jabhat al-Nusra sebagai kelompok teroris. Hal tersebut dimaksudkan untuk

mencegah keterlibatan kaum ekstremis dalam grup oposisi Suriah. Pemimpin Al-Nusra menyatakan kesetiaannya terhadap kelompok al-Qaida pada musim semi 2013. Namun, kelompok tersebut telah menolak untuk bergabung dengan kelompok al-Qaida lainnya, yaitu the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), yang telah melebarkan operasinya ke wilayah Suriah. (Al-Qaeda menghentikan hubungan dengan ISIS pada Februari 2014) Kelompok-kelompok tersebut telah terlibat peperangan antara satu dengan lainnya, termasuk dengan FSA, yang mengindikasikan adanya perpecahan dalam gerakan oposisi.

D. Dampak Konflik

Menurut data yang diperoleh per 1 April 2014, sekitar 6,5 juta warga Suriah sudah meninggalkan kediaman mereka akibat konflik berkepanjangan (Huber dan Kathryn Reid, 2014). Sejak Maret 2011, sebanyak 2,7 juta warga Suriah atau sekitar 10 persen dari total populasi di negara tersebut sudah mengungsi ke negara-negara tetangganya (Nikitin, dkk, 2014). Pada akhir tahun 2014, jumlah pengungsi Suriah diperkirakan akan mencapai 4,1 juta jiwa (AFP, 2013). Menurut UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), hal tersebut menambah beban bantuan organisasi internasional yang harus mengeluarkan dana 12,9 Milyar USD untuk membantu 52 juta jiwa yang rentan terhadap konflik di 17 lokasi krisis di berbagai belahan dunia (AFP, 2013). Hampir setengah dari dana bantuan tersebut dibutuhkan untuk mengatasi dampak konflik Suriah (AFP, 2013).

Pada November 2013, Oxford Research Group melaporkan bahwa setidaknya 11 ribu anak-anak Suriah telah terbunuh akibat konflik. Informasi tersebut diperoleh melalui data PBB dan empat kelompok pembela HAM (Hak Asasi Manusia) di Suriah (Al-Jazeera, 2013). Sumber lainnya menyatakan bahwa jumlah korban telah menyentuh angka 100,000 jiwa (Al-Jazeera, 2013). Sejak September 2013, UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) telah menetapkan sedikitnya 2 juta warga Suriah sebagai pengungsi di empat negara tetangganya, yaitu Yordania, Irak, Libanon, dan Turki (UN. Agency, 2013). Ratusan ribu lainnya tinggal di luar wilayah tersebut tanpa akses terhadap bantuan internasional.

Dampak konflik Suriah sudah mencapai tahap yang semakin mengkhawatirkan, bukan saja bagi warga Suriah yang terpaksa mengungsi, tetapi juga telah menimbulkan permasalahan tersendiri di negara-negara tetangganya. Sebanyak 21 kamp pengungsian telah didirikan di wilayah Turki di bawah wewenang Prime Ministry Disaster & Emergency Management Presidency (AFAD) (Carmickh, 2013). Secara umum, kondisi kamp pengungsian di Turki relatif stabil, namun beberapa kamp juga sempat melancarkan aksi protes akibat ketidaksediaan air bersih dan buruknya kondisi sanitasi.

Di satu sisi, para pengungsi berupaya untuk menuntut hak mereka terhadap kehidupan yang layak, namun di sisi lain, negara penerima juga kerap mengalami kesulitan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Walaupun sejumlah organisasi internasional, termasuk UNHCR, turut terlibat secara langsung dalam menangani pengungsi, perlu diakui pula bahwa ada cost yang dikeluarkan oleh negara penerima karena mereka dituntut untuk mengerahkan sumber daya tertentu dalam mengimplementasikan langkah-langkah kemanusiaan yang diperlukan (Refworld, 2011).

Dalam tiga tahun terakhir (2011–Maret 2014), sekitar 200 ribu warga Suriah telah mengungsi ke wilayah Kurdistan (Irak) (dw.de, 2012). Diantara para pengungsi tersebut juga merupakan warga Irak yang mengungsi ke Suriah untuk menghindari dampak invasi Amerika Serikat pada 2003 lalu. Konflik yang terjadi di Suriah ini telah menambah daftar panjang warga Irak yang kehilangan tempat tinggal di negaranya hingga mencapai 2,8 juta jiwa (Tchie, 2014).

Sejumlah kamp pengungsian yang berada di negara tersebut sudah mengalami kelebihan populasi. Warga setempat juga turut merasakan dampaknya dan menjadi beban bagi pemerintah. Salah satu kekhawatiran yang timbul adalah kemungkinan bahwa sejumlah pengungsi Suriah bergabung dengan milisi Kurdi dan terlibat konflik dengan ekstremis di wilayah perbatasan Suriah-Irak. Akibat lemahnya dokumentasi legal terhadap identifikasi warga pengungsi, sejumlah anak dan wanita semakin rentan terhadap resiko eksploitasi dan penyelundupan manusia. Diperkirakan bahwa pada akhir tahun 2014, jumlah pengungsi Suriah di Irak akan mencapai 400 ribu jiwa (UNHCR, 2014).

Begitu banyaknya kamp yang berdiri, sehingga kamp pengungsian warga Suriah di wilayah Yordania juga akan segera bertambah seiring dengan peningkatan laju pengungsi yang mencapai 600 jiwa setiap harinya. Sampai dengan bulan April 2014, dua kamp pengungsian yang berada di Yordania, Zaatar dan Azraq, masing-masing menampung 100.000 dan 130.000 jiwa. Yordania menampung tidak kurang dari 585.000 pengungsi Suriah (Maigua, 2014). Yordania bukan merupakan negara pihak dari Konvensi Internasional mengenai pengungsi, namun pemerintah Yordania terus bekerjasama dengan organisasi internasional untuk menangani krisis kemanusiaan yang tengah terjadi. Permasalahan yang terjadi adalah bahwa Yordania tidak memiliki sumber daya alam yang cukup, memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi, dan sangat bergantung pada bantuan internasional (Tchie, 2014). Diperkirakan bahwa setengah populasi Yordania merupakan pengungsi asal Palestina (Irin, 2014). Walaupun asumsi tersebut masih dapat diperdebatkan dan cenderung dipolitisir, Yordania memiliki perbandingan jumlah pengungsi dan penduduk asli yang tertinggi di dunia (Chatelard, 2010).

Libanon juga merupakan tujuan utama bagi para pengungsi yang berasal dari Irak dan Palestina. Menurut data bulan April 2014, jumlah pengungsi Suriah di Libanon yang tercatat oleh UNHCR sudah mencapai satu juta jiwa. Pada akhir tahun 2014 (Al-Jazeera, 2014), jumlah pengungsi di wilayah ini diperkirakan dapat mencapai 1,5 juta jiwa, tidak termasuk 450 ribu pengungsi asal Palestina yang terdaftar oleh UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East). Sekitar 10 persen populasi Libanon merupakan warga Palestina (Haddad, 2000) dan setengah diantaranya hidup di 12 kamp pengungsian di tengah maraknya kemiskinan, kelebihan populasi, buruknya kondisi tempat tinggal, dan kurangnya infrastruktur. Sebanyak 18 persen anak jalanan di Libanon berasal dari Palestina (Refworld, 2011).

Selama tiga tahun terakhir, instabilitas politik dan krisis Suriah telah memberikan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi Libanon yang sebelumnya relatif stabil. Walaupun tidak menandatangani Konvensi Pengungsi 1951, Libanon telah menandatangani berbagai perjanjian HAM internasional yang krusial bagi upaya

perlindungan pengungsi. Namun demikian, isu penegakan hukum dan praktek administrasi masih menjadi permasalahan dan menghambat proses pemenuhan kebutuhan para pengungsi dan pencari suaka.

Arus pengungsi Suriah tidak saja mengalir ke negara-negara tetangga terdekatnya, melainkan sudah terdeteksi ke negara-negara lainnya. Kementerian Dalam Negeri Aljazair memperkirakan sekitar 12 ribu warga Suriah telah mengungsi ke negara tersebut. Pada tahun 2012, sedikitnya 1.000 pencari suaka dari Suriah juga tiba di Eropa setiap bulannya (irinnews, 2012). Senada dengan hal tersebut, Refugees International juga melaporkan bahwa pengungsi Suriah bahkan sudah mencapai Bulgaria (kurang lebih 5.000 jiwa), Maldives, dan Thailand (Boyce, 2014).

Fokus perhatian dunia internasional terhadap pengungsi semakin meningkat sejak merebaknya fenomena “Arab Spring” tahun 2010 lalu. Namun demikian, perlu dipahami pula bahwa isu pengungsi memberi dampak yang luar biasa besar bagi negara penerima dan negara transit, serta mempengaruhi stabilitas sistem internasional. Negara-negara tetangga Suriah (Irak, Turki, Yordania, dan Libanon), terkecuali Israel, telah terpengaruh oleh peningkatan arus pengungsi. Di Lebanon khususnya, timbul kekhawatiran jangka panjang terhadap stabilitas domestik (UNHCR, 2014). Isu pengungsi dengan demikian, bukan hanya merupakan isu kemanusiaan, tetapi sudah tereskalasi ke dalam ranah politik (Ryan, 2014). Pertumbuhan populasi dalam jumlah signifikan yang tidak diiringi dengan peningkatan produktifitas juga dapat menjadi bom waktu bagi stabilitas domestik suatu negara.

United Nation High Commission for Refugees (UNHCR) mendefinisikan pengungsi sebagai orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya karena konflik atau peperangan (UNHCR, 2014). Dari sudut pandang demografis, pengungsi dapat dikategorikan sebagai pengungsi dewasa, pengungsi anak-anak, dan pengungsi lanjut usia. Pengungsian bisa terjadi dalam jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung pada perkembangan kondisi di tempat asalnya. Walaupun tidak berada dalam wilayah yurisdiksi negara asalnya, para pengungsi tetap memiliki hak-hak sebagaimana yang melekat dan di atur dalam UN Declaration on Human Rights dan Artikel 12-30 dari Refugee Convention, termasuk hak untuk beragama, hak untuk memiliki harta benda, hak untuk meminta dan menerima bantuan kemanusiaan, hak untuk berpindah tempat, dan hak untuk memperoleh pendidikan yang layak (UNHR, 2014).

Pengungsi sebagaimana manusia lainnya juga memiliki kebutuhan dasar untuk dapat terlibat dalam lingkungan sosialnya. Kebutuhan dasar tersebut meliputi: rasa aman, kasih sayang, kesempatan untuk mencapai cita-cita, dan diterima oleh masyarakat (Nicholds, 1965). Keamanan sosial individu merupakan bagian tidak terpisahkan dari aspek pembangunan berkelanjutan yang hanya dapat tercapai, apabila seorang individu memiliki pendapatan yang layak dan stabil, jaminan kesehatan, gizi baik, tempat tinggal yang layak, akses untuk memperoleh pendidikan, ketersediaan air bersih dan sanitasi.

Dalam jangka panjang, instabilitas sosial dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar bagi para pengungsi dapat menimbulkan dampak sosial- psikologis, termasuk gangguan mental seperti depresi, trauma, dan keinginan untuk bunuh diri. Pengungsi anak-anak lebih rentan terhadap kondisi yang ada di penampungan, bahkan dalam jangka pendek. Permasalahan yang sering timbul pada anak adalah: gangguan perkembangan dan

pertumbuhan, gangguan tidur, depresi, dan berkurangnya kemampuan akademik (Kronick, 2012). Padahal seiring dengan berkembangnya konflik Suriah, jumlah pengungsi anak telah mencapai setengah dari jumlah pengungsi Suriah, atau lebih dari 1 juta jiwa (UNCH, 2014). Mereka tinggal di kamp pengungsian dan banyak diantaranya sudah kehilangan anggota keluarga.

Aksi kekerasan yang dipertontonkan selama konflik di Suriah apabila dikaji untuk waktu jangka panjang, maka konflik dapat merusak kesehatan mental individu dan menghambat perkembangan psikologisnya (UNOCHA, 2001). Implikasi negatif tersebut akan lebih berdampak pada anak. Dalam kasus konflik Suriah, anak-anak tidak bisa mengandalkan orang tua mereka untuk mendapatkan perlindungan karena banyak diantara mereka yang anggota keluarganya tewas dalam konflik. Mereka juga tidak dapat memperoleh perlindungan dari institusi yang berwenang karena runtuhnya sistem pemerintahan yang ada. Selain menyebabkan warganya kehilangan tempat tinggal, konflik Suriah juga menyebabkan hancurnya sistem pendidikan, yang akhirnya dapat meningkatkan ketidakstabilan emosi anak-anak, karena hilangnya kesempatan untuk turut ambil bagian dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Selain aspek pendidikan, tumbuh kembang anak juga dipengaruhi oleh faktor lainnya, termasuk kepercayaan diri, menerima kasih sayang, dan penerimaan masyarakat.

Kekerasan yang dialami oleh anak, ditambah dengan kurangnya faktor pendukung kesehatan dan tumbuh-kembang anak di lokasi-lokasi konflik dapat menyebabkan trauma yang mendorong timbulnya ketidakseimbangan mental. Anak-anak yang menjadi korban atau menyaksikan kekerasan lebih berpotensi untuk terlibat dalam aksi kriminal di kemudian hari (Turman, 1999). Risiko dari konflik yang berkepanjangan adalah lahirnya generasi yang hidup dalam konflik, apatis, dan cenderung bersikap bermusuhan. Dalam jangka panjang, generasi yang lahir dari konflik dapat menimbulkan goncangan terhadap stabilitas sosial dan keamanan global serta menjadi beban bagi komunitas internasional.

Konflik itu sendiri juga merupakan bencana kemanusiaan. Penyerangan dan kekerasan seksual, termasuk terhadap anak, seringkali digunakan sebagai senjata psikologis. Pemaksaan dalam industri prostitusi juga dapat timbul sebagai efek samping dari konflik dan krisis yang berkepanjangan. Banyak anak-anak yang kehilangan keluarganya kemudian bergabung dengan milisi ataupun pemberontak bersenjata dan terlibat dalam peperangan, bukan sebagai target melainkan sebagai combatant. Konflik dan peperangan melahirkan generasi muda yang terindoktrinasi dengan kekerasan. Dengan demikian, anak akan rentan terlibat dalam aksi-aksi terorisme (Singer, 2002). Perang dan kemiskinan juga merupakan lingkaran setan dalam konflik yang berkepanjangan (The Economist, 2011). Terputusnya akses terhadap makanan dan ketersediaan air bersih dapat meningkatkan risiko kekurangan gizi, masalah kesehatan, gangguan mental, dan kekerasan, terutama pada anak-anak.

Pada tahun 2014, jumlah imigran ilegal yang memasuki Eropa cenderung mengalami peningkatan, mayoritas diantara mereka berasal dari Suriah (Gibson, 2014). Para pengungsi menggunakan jasa para penyelundup manusia dengan mengeluarkan biaya yang berkisar antara 6.000 hingga 16.000 USD untuk mencapai Eropa (Marrouch, 2013). Untuk mengantar para pengungsi dari Istanbul ke Edirne, kota kecil di Turki yang

lokasinya berdekatan dengan perbatasan Eropa, seorang penyelundup mengenakan biaya 400 Euro per orang (Trilling, 2014). Dari perbatasan, para pengungsi harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melewati kawasan hutan Bulgaria.

Memperhatikan dampak kekerasan terhadap anak-anak, baik yang masih berada di lokasi konflik maupun di pengungsian, berlanjutnya konflik Suriah tidak dapat dipandang sebelah mata. Indonesia perlu menekankan bahwa pelanggaran HAM bukan saja telah dilakukan oleh rezim Assad terhadap warga negaranya, tetapi oleh negara-negara pihak Konvensi Pengungsi 1951 yang menolak kedatangan pengungsi dan memperkeruh stabilitas sistem internasional.

PENUTUP

Akar masalah penyebab lahirnya konflik di Suriah bukanlah persoalan perbedaan mazhab keagamaan antara Bashar al-Assad yang bermazhab Syi'ah Alawiyah versus para oposisi yang bermazhab Sunni. Penyebab konflik juga bukan karena pemerintah Suriah tidak demokratis, seperti yang terjadi di Tunisia, Mesir, dan Libya. Akar masalah yang menjadi penyebab konflik di Suriah adalah kepentingan politik dan ekonomi negara-negara pendukung oposisi yang menuntut penggantian rezim dan negara-negara yang mendukung Presiden al-Asaad. Tuntutan penggantian rezim dan pengunduran diri Presiden al-Assad merupakan pintu masuk lahirnya konflik dan perang di Suriah. Ada tiga aktor utama yang terlibat dalam konflik di Suriah, Presiden Bashar al- Assad dan para pendukungnya, oposisi Suriah, dan Jihadis. Dampaknya bagi Suriah adalah jatuhnya korban jiwa dan pengungsi. Sejak meletusnya konflik pada Maret 2011 sampai dengan April 2013 jumlah korban meninggal sebanyak 150.000 jiwa. Sementara warga yang mengungsi sebanyak 2.4 juta orang, 3/4 diantara pengungsi itu adalah anak-anak dan perempuan. Sekitar 4 juta warga Suriah yang kehilangan tempat tinggal dan tetap bertahan di Suriah sampai sekarang. Bagi dunia internasional, konflik Suriah berdampak dalam penanganan pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

- AFP, 2013. "UN: Syrian refugees to Nearly Double by End 2014," *Geneva*.
- BBC Indonesia. 2013. *AS pastikan Suriah gunakan senjata kimia*.
- Blanchard, Christopher M. Carla E. Humud, dan Mary Beth D. Nikitin. 2014. "Armed Conflict in Syria: Overview and U.S. Response".
- Boyce, Michael. 2014. "Beyond Emergency Assistance: Syrian Refugees in Northern Iraq and Jordan". *Refugees international*.
- Chatelard, Geraldine. 2010. *Jordan: A Refugee Haven*. Migration Policy Institute.
- Cleveland, Janet. Cécile Rousseau. dan Rachel Kronick. 2012. "The harmful effects of detention and family separation on asylum seekers' mental health in the context of Bill C-31," dalam *Brief submitted to the House of Commons Standing Committee on Citizenship and Immigration concerning Bill C-31, the Protecting Canada's Immigration System Act*.
- Dw.de, 2012. "Kepentingan Arab Saudi dalam Perang Suriah," dalam *www.dw.de*.
- Encyclopaedia Britannia, 2014. "Syrian-Civil-War," dalam *www.britannica.com*.
- Ghafur, Muhammad Fakhry. 2012. "Membaca Konflik Suriah," dalam *www.politik.lipi.go.id*.
- Gibson, Charlotte MsDonald. 2014. *Syria conflict: Hundreds more desperate refugees could die at sea as Europe does little to help*.
- Haddad, Simon. 2000. "The Palestinian Predicament in Lebanon." *Middle East Quarterly*.
- Holder, Eric H. Jr. dan Kathryn M. Turman. 1999, *Message from the Deputy Attorney General, Breaking the Cycle of Violence: Recommendations to Improve the Criminal Justice Response to Child Victims and Witnesses*, U.S. Department of Justice.
- Huber, Chris dan Kathryn Reid, 2014. "Faqs: War in Syria, Children, and the Refugee Crisis," dalam *www.worldvision.org*.
- IRIN, 2014. "Analysis: Palestinian refugees from Syria feel abandoned," dalam *Humanitarian News and Analysis*, <http://www.irinnews.org/report/96202/analysis-palestinian-refugees-from-syria-feel-abandoned>
- Al-Jazeera. 2013 "Report: Over 11,000 Syrian Children Killed in War, Most by Explosives".
- Maigua, Patrick. 2014. "New refugee camp in Jordan as more Syrian refugees flee conflict," *United Nations, Geneva*. <http://www.unmultimedia.org/radio/english/2014/03/new-refugee-camp-in-jordan-as-more-syrian-refugees-flee-conflict-and-violence/#.U0yayScaySM>
- Muti'ah, Siti. 2012. "Pergolakan Panjang Suriah: Masih Adakah Pan-Arabisme dan Pan-Islamisme?" dalam *Jurnal CMES Volume V Nomor 1*.
- Nicholds, Elizabeth. 1965. *A Primer of Sosial Case Work*. New York: Columbia University Press.

- Refworld. 2011 *"The role of host countries: the cost and impact of hosting refugees"*. Executive Committee of the High Commissioner's Programme Standing Committee 51st meeting.
- Ryan, Missy. 2014. "Syria refugee crisis poses major threat to Lebanese stability". Reuters. <http://www.reuters.com/article/2014/03/28/us-lebanon-usa-idUSBREA2R02E20140328>
- Sharp, Jeremy M. and Christopher M. Blanchard. 2013 *"Armed Conflict in Syria: Background and U.S. Response"*. Congressional Research and Service.
- Singer, Peter W. 2002. "Children at War". Artikel *Brookings Institution*, Amerika Serikat.
- Starr, Stephen. 2012. *Revolt in Syria: Eye-Witness to the Uprising*. London: C Hurst & Co.
- Sulaiman, Dina Y. 2013. *Praha Suriah: Membongkar Persekongkolan Multinasional*. Depok: IMA N.
- Tchie, Andrew Edward. 2014. "The shame of it all: The wave of refugees flooding the Middle East," *Journal of Turkish Weekly (JTW)*. Ankara, Turkey. International Strategic Research Organization.
- The Economist. 2011. *The Economics of Violence*.
- Trilling, Daniel. 2014. The road to nowhere: the Syrian refugees left out in the cold by Europe. dalam <http://www.newstatesman.com/2014/01/road-to-nowhere-syria>
- UN Agency. 2013. "Number of Syrian refugees tops 2 million, with 'more on the way. dalam <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45757#.U0yVMicayK0>
- UNHCR. 2014. "Syria Regional Response Plan-Iraq," dalam <http://www.unhcr.org/syriarrp6/docs/syria-rrp6-iraq-response-plan.pdf>
- Voa-Islam. 2013. "Diskusi terbuka: inilah pandangan Joserizal tentang konflik Suriah". dalam www.voa-islam.com.